

## Kajian Kepuasan Bermukim dalam Mewujudkan Livability di Kecamatan Kiaracandong

**Andi Nur Aldaena Aprilia Passau, Verry Damayanti**

Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

aldaenapassau@gmail.com, unisbavd@gmail.com

**Abstract.** Settlement is one of the basic human needs. The development of urban settlements is carried out by developing basic facilities and infrastructure. One of the essence of settlement development is to create livable urban conditions. The increase in population living in the Kiaracandong sub-district will certainly increase the need for space to meet the increasing and varied needs of the population. The research question is "What is the level of satisfaction of residents living in the Kiaracandong District?" The purpose of this study was to determine the level of settler satisfaction felt by the community in increasing livability in Kiaracandong District. Primary data collection was carried out through a questionnaire through a Google form that was distributed to community respondents residing in Kiaracandong District. Data processing techniques using Microsoft Excel and SPSS software. The analytical method used is quantitative descriptive using Importance Performance Analysis (IPA) which uses a Cartesian diagram to determine performance ratings and expectations. The results of this study indicate that the community in the Kiaracandong Sub-district has not been satisfied with the quality of the residential environment in the Kiaracandong Sub-District with a value of 62.46%, this indicates that the value is still below the satisfaction standard of > 100%. For the results of the Cartesian diagram there are 9 service indicators that still need to be improved and improved so that the quality of service will improve in the future.

**Keywords:** Livable, Settlement, Satisfaction, Importance Performance Analysis (IPA).

**Abstrak.** Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pengembangan permukiman perkotaan dilakukan dengan pengembangan sarana dan prasarana dasar. Salah satu hakekat pengembangan permukiman adalah untuk mewujudkan kondisi perkotaan yang livable. Peningkatan penduduk yang bermukim di Kecamatan Kiaracandong tentu akan semakin menambah kebutuhan akan ruang untuk pemenuhan kebutuhan penduduk yang semakin meningkat dan beragam. Pertanyaan penelitian yaitu "Bagaimana tingkat kepuasan bermukim masyarakat di Kecamatan Kiaracandong?". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan bermukim yang dirasakan masyarakat dalam meningkatkan livability di Kecamatan Kiaracandong. Pengumpulan data primer dilakukan melalui kuesioner melalui google form yang disebarakan kepada responden masyarakat yang bertempat tinggal di Kecamatan Kiaracandong. Teknik pengolahan data menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel dan SPSS. Metode analisis yang digunakan

adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan Importance Performance Analysis (IPA) yang di dalamnya menggunakan diagram cartesius untuk mengetahui peringkat kinerja dan harapan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat yang ada di Kecamatan Kiaracondong belum merasa puas terhadap kualitas lingkungan hunian yang ada di Kecamatan Kiaracondong dengan perolehan nilai sebesar 62,46% hal ini menunjukkan bahwa nilai tersebut masih dibawah standar kepuasan yaitu >100%. Untuk hasil dari diagram cartesius terdapat 9 indikator pelayanan yang masih harus diperbaiki dan ditingkatkan lagi agar kualitas pelayanan akan semakin membaik kedepannya.

**Kata Kunci: Layak Huni, Permukiman, Kepuasan, Importance Performance Analysis (IPA).**

## 1. Pendahuluan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dokumen Strategi Kawasan Hunian Kumuh Perkotaan (Penyusunan Program Penataan Kawasan Hunian Kumuh Perkotaan), teridentifikasi kawasan permukiman kumuh di Kota Bandung berada di 442 RW yang tersebar di 33 kecamatan. Berdasarkan hasil kajian yang ada, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan lokasi permukiman kumuh melalui SK Walikota Nomor 648/Kep.286-distarcip/2015 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman kumuh di Kota Bandung. Berdasarkan tingkat kekumuhannya, permukiman kumuh dengan tingkat kekumuhan tinggi terdapat pada lima kecamatan yakni salah satunya terdapat di Kecamatan Kiaracondong hal ini sesuai dengan indeks Livable City yang didapatkan dari data Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung bahwa Kecamatan Kiaracondong berada pada indeks paling rendah yaitu hanya sebesar 5,97.

Di beberapa kelurahan di Kecamatan Kiaracondong masih banyak dijumpai permukiman kumuh dengan kondisi rumah dan lingkungan yang tidak layak dan tidak memenuhi syarat rumah sehat. Kecamatan Kiaracondong adalah daerah yang pertumbuhan ekonomi sektor jasa dan perdagangannya sangat menonjol disertai populasi penduduk serta hunian yang padat sedangkan tingkat ketersediaan alam dan lingkungan hidup tergolong kurang memadai bahkan cenderung kritis. Kecamatan Kiaracondong memiliki luas 6,12 km<sup>2</sup> dan sebagian besar lahan di wilayah ini digunakan untuk pemukiman penduduk. Kepadatan penduduk di Kecamatan Kiaracondong mencapai angka 21,81 jiwa/km<sup>2</sup>. Dilihat dari segi kepadatan penduduk, maka Kecamatan Kiaracondong dapat dikategorikan sebagai daerah yang sangat padat karena melebihi angka rata-rata kepadatan penduduk Kota Bandung yang hanya 14,96 jiwa/km<sup>2</sup>. Jika dibiarkan terus-menerus hal ini dapat menimbulkan gangguan keseimbangan ekosistem yang cukup serius. Pertumbuhan penduduk yang semakin lama terus bertambah akan disertai dengan semakin bertambahnya kebutuhan akan pangan, perumahan, fasilitas umum, air bersih, energi dan lain-lain, sedangkan lahan yang tersedia sangat terbatas. Ketidakseimbangan antara supply dan demand pastinya akan berdampak pada munculnya permasalahan-permasalahan yang berimbas pada kenyamanan suatu kota. Pada saat ini, Kecamatan Kiaracondong kaya dengan langkah-langkah pertumbuhan bangunan dan aktifitas polutan. Hal yang tengah terjadi di Kecamatan Kiaracondong yaitu laju pertumbuhan penduduk dari faktor urbanisasi sangat tinggi dan ketersediaan hunian semakin kecil sehingga mempengaruhi kualitas lingkungan rumah tinggal yang ada di daerah tersebut.

Upaya pembangunan kota harus mengacu pada kebijakan yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat agar semua anggota masyarakat dapat menetap di kota yang layak huni, berkeadilan sosial, sejahtera, dan berkembang secara berkelanjutan (Wahyono,

2008). Agar tercapainya keberhasilan pembangunan tersebut maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya serta mereka juga yang nantinya akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil tidaknya pembangunan di wilayah mereka sehingga penilaian tersebut bersifat objektif. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Pacione (1990) menyatakan bahwa *livable city* dapat diwujudkan dengan mengetahui kualitas lingkungan secara subjektif. Penilaian subjektif tersebut dapat dilakukan dengan mengetahui tingkat kepuasan bermukim dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Melihat dari fenomena di atas, perlu dilakukan kajian mengenai “*Kajian Kepuasan Bermukim dalam Mewujudkan Livability di Kecamatan Kiaracondong.*” Sehingga tujuan dari hasil kajian penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi *livable* di Kecamatan Kiaracondong, untuk melihat tingkat kepuasan bermukim dalam meningkatkan *livability* di Kecamatan Kiaracondong berdasarkan kepuasan masyarakat, teridentifikasi indikator mana saja yang harus diprioritaskan dalam meningkatkan *livability* di Kecamatan Kiaracondong sehingga penelitian ini dapat menjadi acuan, masukan, serta rekomendasi pemerintah Kota Bandung atau bagi para stakeholders khususnya di Kecamatan Kiaracondong dalam mengembangkan kecamatan ini menjadi layak huni.

## 2. Landasan Teori

Kota layak huni atau *Livable City* adalah dimana masyarakat dapat hidup dengan nyaman dan tenang dalam suatu kota. Menurut Hahlweg (1997), “kota yang layak huni adalah kota yang dapat menampung seluruh kegiatan masyarakat kota dan aman bagi seluruh masyarakat”. Menurut Evan (2002), konsep *Livable City* digunakan untuk mewujudkan bahwa gagasan pembangunan sebagai peningkatan dalam kualitas hidup membutuhkan fisik maupun habitat sosial untuk realisasinya. Dalam mewujudkan kota yang layak huni atau *Liveable City* harus mempunyai prinsip-prinsip dasar. Prinsip dasar ini harus dimiliki oleh kota-kota yang menjadikan kotanya sebagai kota yang layak huni dan nyaman bagi masyarakat kota.

Dalam mewujudkan kota yang layak huni atau *Livable City* harus mempunyai prinsip-prinsip dasar. Prinsip dasar ini harus dimiliki oleh kota-kota yang ingin menjadikan kotanya sebagai kota layak huni dan nyaman bagi masyarakat kota. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dasar untuk mewujudkan *Livable City*:

Menurut Lennard (1997), prinsip dasar untuk *Livable City* adalah:

1. Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik);
2. Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas ibadah/kesehatan/ibadah);
3. Tersedianya ruang dan tempat public untuk bersosialisasi dan berinteraksi;
4. Keamanan, dan bebas dari rasa takut;
5. Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya;
6. Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik;

Kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja di bawah harapan, maka masyarakat akan kecewa. Bila kinerja sesuai dengan harapan, maka masyarakat akan puas. Sedangkan bila kinerja melebihi harapan, masyarakat akan sangat puas. Harapan masyarakat dapat dibentuk oleh masyarakat masa lampau, komentar dari kerabatnya serta janji dan informasi pemasar dan saingannya. Masyarakat yang puas akan setia lebih lama, kurang sensitif terhadap harga dan memberi komentar yang baik tentang organisasi publik.

Menurut Lupiyoadi (2006: 155), faktor utama penentu kepuasan masyarakat adalah persepsi terhadap kualitas jasa. Apabila ditinjau lebih jauh, pencapaian kepuasan masyarakat melalui kualitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Memperkecil kesenjangan yang terjadi antara pihak manajemen dengan pihak masyarakat;
2. Organisasi publik harus mampu membangun komitmen bersama untuk menciptakan visi di dalam perbaikan proses pelayanan;
3. Memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menyampaikan keluhan dengan membentuk sistem saran dan kritik;
4. Mengembangkan pelayanan untuk mencapai kepuasan dan harapan masyarakat;

Menurut Pacione (1990) menyatakan bahwa livable city dapat diwujudkan dengan mengetahui kualitas lingkungan secara subjektif. Penilaian subjektif tersebut dapat dilakukan dengan mengetahui tingkat kepuasan bermukim dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dibahas yaitu mengenai livability dan juga reduksi indikator dan variabel dari berbagai sumber sesuai dengan lingkup pembahasan maka dapat disimpulkan hasil sintesis tinjauan pustaka berupa faktor dan variabel sebagai berikut:

**Tabel 1.** Kompilasi Indikator *Livable City*

Variabel	Indikator	Literatur/Sumber	
a. Aspek Tata Ruang	1. Ketersediaan taman/ruang publik di tempat tinggal (x1.1)	• <i>Survey Livable City Index Kota Bandung. 2018</i>	
	2. Bangunan-bangunan yang tertata dengan rapi di sekitar tempat tinggal (x1.2)	• <i>Most Livable City Index. IAP. 2017</i> • <i>Economy Inteleigent Unit (EIU). 2012</i>	
b. Aspek Transportasi	3. Ketersediaan angkutan umum (x2.1)	• <i>Most Livable City Index. IAP 2017</i>	
	4. Kualitas angkutan umum (x2.2)	• <i>Global Liveability Index. 2019</i>	
	5. Kualitas kondisi jalan (x2.3)	• <i>Survey Livable City Index Kota Bandung. 2018</i>	
	6. Kualitas pejalan kaki (x2.4)	• <i>Padma Sekar Annisa. 2016</i>	
	7. Kenyamanan pejalan kaki (x2.5)	• <i>SDGs. 2019</i>	
	8. Kemacetan kendaraan (x2.6)		
c. Aspek Fasilitas	9. Ketersediaan fasilitas kesehatan (x3.1)	• <i>Community Indicators Victoria. Data Framework. 2013</i>	
	10. Kualitas fasilitas kesehatan (x3.2)	• <i>SDGs. 2019</i>	
	11. Ketersediaan fasilitas pendidikan (x3.3)	• <i>Survey Liveable City Index Kota Bandung. 2018</i>	
	12. Kualitas fasilitas pendidikan (x3.4)	• <i>Global Liveability Index. 2019</i>	
	13. Ketersediaan fasilitas peribadatan (x3.5)		
	14. Ketersediaan fasilitas olahraga(x3.6)		
d. Aspek Utilitas	15. Ketersediaan fasilitas rekreasi (x3.7)		
	16. Ketersediaan air bersih (x4.1)	• <i>Most Livable City Index. IAP. 2017</i>	
	17. Kualitas air bersih (x4.2)	• <i>Global Liveability Index. 2019</i>	
	18. Kualitas jaringan listrik (x4.3)	• <i>Center For Liveable City Singapura. 2012</i> • <i>Gita Nawangwulan. 2019</i>	
e. Aspek Lingkungan	19. Kualitas jaringan telekomunikasi (x4.4)		
	20. Kebersihan lingkungan tempat tinggal (x5.1)	• <i>Victorian Competition and Efficiency Commision Melbourne. 2019</i>	
	21. Kualitas udara di sekitar tempat tinggal (x5.2)	• <i>Most Livable City Index. IAP 2017</i>	
	22. Pencemaran air dan tanah (x5.3)	• <i>SDGs. 2019</i> • <i>Economy Inteleigent Unit (EIU). 2012</i> • <i>Survey Livable City Index Kota Bandung. 2018</i>	
f. Aspek Sosial	23. Interaksi hubungan antarpenduduk (x6.1)	• <i>Most Livable City Index. IAP 2017</i>	
	24. Kenyamanan bertempat tinggal antarpenduduk (x6.2)	• <i>Global Liveability Index. 2019</i>	
	25. Ketersediaan fasilitas terhadap kaum disabilitas (x6.3)	• <i>Survey Liveable City Index Kota Bandung. 2018</i>	
	26. Tingkat kriminalitas (x6.4)	• <i>Padma Sekar Annisa. 2016</i>	
	27. Lingkungan yang aman dari bencana alam (x6.5)		
	28. Lingkungan yang aman dari bencana buatan (x6.6)		
	g. Aspek Ekonomi	29. Persepsi masyarakat trhdp keseimbangan hidup (kehidupan pribadi & pekerjaan) (x7.1)	• <i>Victorian Competition and Efficiency Commision Melbourne. 2019</i>
		30. Persepsi penghidupan yang layak (x7.2)	• <i>Most Livable City Index. IAP 2017</i>
31. Persepsi penanggungan biaya hidup (x7.3)		• <i>Survey Livable City Index Kota Bandung. 2018</i>	

Sumber: Hasil Olahan Penulis dari Berbagai Sumber, 2020

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut adalah penelitian mengenai kajian kepuasan bermukim dalam mewujudkan *livability* di Kecamatan Kiaracondong dengan menggunakan teknik analisis *Importance Performance Analysis* (IPA). Hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Analisis Importance Performance Analysis (IPA)

Dari hasil perhitungan kinerja dan harapan dari masing-masing aspek tata ruang, transportasi, fasilitas, utilitas, lingkungan, sosial dan ekonomi maka didapatkan nilai kinerja (X) dan nilai harapan (Y).

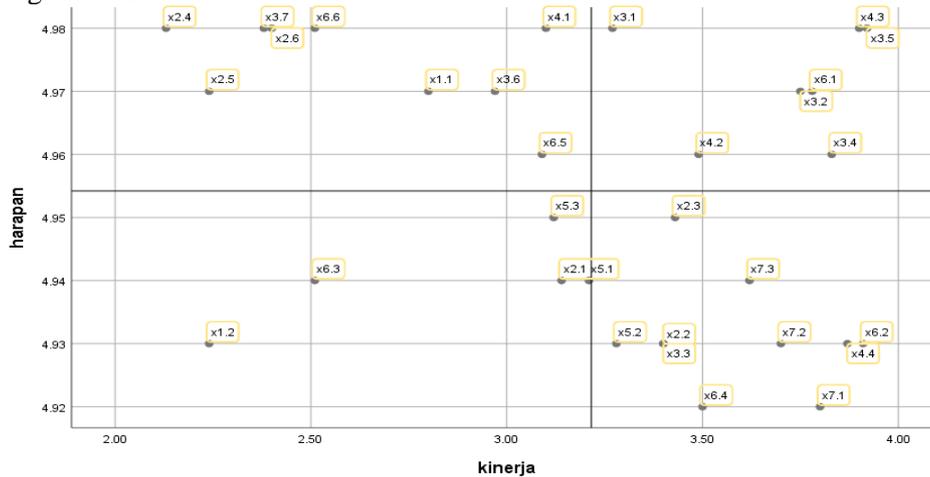
**Tabel 2.** Nilai Kinerja (X) dan Nilai Harapan (Y)

No.	Item	Importance Performance Analysis (IPA)		Tingkat Kesesuaian (%)
		X	Y	
1.	x1.1	2.8	4.97	56.3
2.	x1.2	2.24	4.93	45.4
3.	x2.1	3.14	4.94	63.56
4.	x2.2	3.40	4.93	68.96
5.	x2.3	3.43	4.95	69.29
6.	x2.4	2.14	4.98	42.9
7.	x2.5	2.24	4.97	45.07
8.	x2.6	2.37	4.98	47.50
9.	x3.1	3.27	4.98	65.66
10.	x3.2	3.75	4.97	75.45
11.	x3.3	3.42	4.93	69.37
12.	x3.4	3.83	5.00	76.6
13.	x3.5	3.92	4.93	79.35
14.	x3.6	2.97	4.97	59.75
15.	x3.7	2.38	4.98	47.79
16.	x4.1	2,37	4.98	47.5
17.	x4.2	3.10	4.96	62.5
18.	x4.3	3.86	4.98	77.5
19.	x4.4	3.87	4.93	78.4
20.	x5.1	3.21	4.93	65.11
21.	x5.2	3.28	4.95	66.26
22.	x5.3	3.26	4.97	65.59
23.	x6.1	3.79	4.97	76.25
24.	x6.2	3.91	4.93	79.31
25.	x6.3	2.51	4.94	50.80
26.	x6.4	3.50	4.92	71.13
27.	x6.5	3.09	4.96	62.29
28.	x6.6	2.51	4.98	51.43
29.	x7.1	3.80	4.92	77.23
30.	x7.2	3.70	4.93	75.05
31.	x7.3	3.62	4.94	73.27
	<b>RATA-RATA</b>	<b>3,22</b>	<b>4,95</b>	<b>62,46</b>

Sumber: Hasil Perhitungan dan Analisis, 2020

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai rata-rata tingkat kesesuaian dari gabungan semua aspek dan indikator adalah sebesar 62.46%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum merasa puas terhadap kondisi *livable* saat ini yang ada di Kecamatan Kiaracondong. Karena hal ini didukung dengan pendapat Sudaryanto (2007) jika presentase 80-100% maka kesesuaian tersebut dapat dikatakan kinerja dari masing-masing atribut telah dapat memenuhi harapan dari konsumen sedangkan pada kenyataannya dari skor tersebut menunjukkan nilai masih dibawah 80% dari standar tingkat kesesuaian.

2. Diagram Cartesius



**Gambar 1.** Hasil Pengujian Terhadap Nilai Kinerja & Harapan

Dari gambar di atas maka dapat diinterpretasikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.** Klasifikasi Kuadran dan Indikatornya

Kuadran A ( <i>Concentrate Here</i> )	
X1.1 Ketersediaan taman/ruang publik di tempat tinggal	X3.7 Ketersediaan fasilitas rekreasi
X2.4 Kualitas pejalan kaki	X4.1 Ketersediaan air bersih
X2.5 Kenyamanan pejalan kaki	X6.5 Lingkungan yang aman dari bencana alam
X2.6 Kemacetan kendaraan	X6.6 Lingkungan yang aman dari bencana buatan
X3.6 Ketersediaan fasilitas olahraga	
Kuadran B ( <i>Keep Up The Good Work</i> )	
X3.1 Ketersediaan fasilitas kesehatan	X4.2 Kualitas air bersih
X3.2 Kualitas fasilitas kesehatan	X4.3 Kualitas jaringan listrik
X3.4 Kualitas fasilitas pendidikan	X6.1 Interaksi hubungan antarpendinguduk
X3.5 Ketersediaan fasilitas peribadatan	
Kuadran C ( <i>Low Priority</i> )	
X1.2 Bangunan-bangunan rapi disekitar tempat tinggal	X5.3 Pencemaran air dan tanah
X2.1 Ketersediaan angkutan umum	X6.3 Ketersediaan fasilitas terhadap kaum disabilitas
X5.1 Kebersihan lingkungan tempat tinggal	
Kuadran D ( <i>Possible Overkill</i> )	
X2.2 Kualitas angkutan umum	X5.2 Kualitas udara di sekitar tempat tinggal
X2.3 Kualitas kondisi jalan	X6.2 Kenyamanan bertempat tinggal antarpendinguduk
X3.3 Ketersediaan fasilitas pendidikan	X6.4 Tingkat kriminalitas
X4.4 Kualitas jaringan telekomunikasi	X7.2 Persepsi penghidupan yang layak
X5.1 Kebersihan lingkungan tempat tinggal	X7.3 Persepsi penanggungan biaya hidup

Sumber: Hasil Perhitungan, 2020

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kepuasan bermukim masyarakat di masing-masing kelurahan di Kecamatan Kiaracandong masih rendah. Karena banyak terdapat penurunan kualitas lingkungan hunian di masing-masing kelurahan yang ada di Kecamatan Kiaracandong. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum merasa puas terhadap kualitas lingkungan hunian yang ada di Kecamatan Kiaracandong.

Berdasarkan hasil dari Importance Performance Analysis (IPA), terdapat 9 indikator yang berada pada kuadran A (concentrate here), kesembilan indikator tersebut adalah ketersediaan taman/ruang terbuka public di tempat tinggal, kualitas pejalan kaki, kenyamanan pejalan kaki, kemacetan kendaraan, ketersediaan fasilitas olahraga, ketersediaan fasilitas rekreasi, ketersediaan air bersih, lingkungan yang aman dari bencana alam, dan lingkungan yang aman dari bencana buatan. Hal ini menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut dianggap penting oleh para responden, namun kinerjanya masih dirasakan kurang dan perlu ditingkatkan lagi.

Indikator yang termasuk pada kuadran B (keep up the good work) ada 7 indikator yaitu ketersediaan fasilitas kesehatan, kualitas fasilitas kesehatan, kualitas fasilitas pendidikan, ketersediaan fasilitas peribadatan, kualitas air bersih, kualitas jaringan listrik, dan interaksi hubungan antarpenduduk. Hal ini menunjukkan bahwa indikator-indikator ini dianggap penting oleh para responden dan kinerjanya sudah baik sehingga harus dipertahankan dan juga terus ditingkatkan.

Indikator pada kuadran C (low priority) ada 5 indikator yaitu bangunan-bangunan rapi di sekitar tempat tinggal, ketersediaan angkutan umum, kebersihan lingkungan tempat tinggal, pencemaran air dan tanah, dan ketersediaan fasilitas terhadap kaum disabilitas. Hal ini berarti indikator-indikator yang terdapat di kuadran ini dianggap tidak terlalu penting oleh responden atau terlalu berlebihan sehingga perlu mengurangi kinerjanya.

Indikator yang berada pada kuadran D (possible overkill) terdapat 10 indikator yaitu kualitas angkutan umum, kualitas kondisi jalan, ketersediaan fasilitas pendidikan, kualitas jaringan telekomunikasi, kebersihan lingkungan tempat tinggal, kualitas udara di sekitar tempat tinggal, kenyamanan bertempat tinggal antarpenduduk, tingkat kriminalitas, persepsi penghidupan yang layak, persepsi penanggungan biaya hidup. Hal ini berarti indikator-indikator yang terdapat di kuadran D ini dianggap tidak terlalu penting dan kinerjanya juga masih kurang baik.

#### 5. Saran

##### Saran Teoritis

Berdasarkan hasil dari Importance Performance Analysis (IPA), Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan peningkatan kinerja pelayanan pada indikator yang menjadi prioritas tinggi yaitu ketersediaan taman/ruang terbuka publik sehingga mengurangi adanya bencana alam contohnya banjir atau longsor. kualitas pejalan kaki agar dapat mempermudah masyarakat melakukan aktivitas sehari-hari, ketersediaan fasilitas olahraga dan rekreasi untuk menunjang masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari agar indeks kebahagiaan masyarakat di Kecamatan Kiaracandong lebih meningkat, ketersediaan air bersih untuk menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat yang tinggal di Kecamatan Kiaracandong, dan lingkungan yang aman dari bencana alam dan bencana buatan sehingga masyarakat dapat merasa aman dan nyaman tinggal di Kecamatan Kiaracandong.

##### Saran Praktis

1. Pemerintah dapat mempertahankan dan meningkatkan indikator-indikator yang dinilai baik sehingga masyarakat di Kecamatan Kiaracandong selalu merasa puas terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.
2. Peneliti juga mendorong penelitian lebih lanjut yang mengkaji tingkat kepuasan serupa dengan tingkat atribut sosial ekonomi dan sosial budaya yang berbeda yang mungkin mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang livability.

### Daftar Pustaka

- [1] Annisa, Padma Sekar. 2015. Kajian Kondisi Layak Huni Kota Balikpapan Berdasarkan Persepsi Masyarakat. Tugas Akhir. Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada. DIY
- [2] Darise, Djunaidi Irwinsyah. 2013. Kajian Kota Manado Sebagai Kota Layak Huni Berdasarkan Kriteria IAP (Ikatan Ahli Perencanaan) Tugas Akhir. Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota Universitas, Sam Ratulangi Manado. Manado
- [3] Joga, Nirwono. 2011. RTH 30% Resolusi (Kota) Hijau. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- [4] Kristarani, Hillary. 2015. Kajian Kota Layak Huni Dari Aspek Lingkungan Hidup di Kota Tegal Jawa Tengah. Tugas Akhir. Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada. DIY
- [5] Martin, Willy., Sela, Rieneke., dan Rompas, Leidy. 2019. Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Menuju Kota Layak Huni (Livable City) Studi Kasus Kota manado. Jurnal Spasial, Volume 6, Nomor 2, November 2019. Manado: Staf Pengajar Jurusan Arsitektur Unsrat. Hal 1-9.
- [6] Perda Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Bandung Tahun 2015-2035
- [7] Permen PU Nomor 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman. Umum Program Kota Tanpa Kumuh
- [8] Suryaningsih, Mega. 2015. Identifikasi Konsep Kota Layak Huni di Kota Surabaya dengan Metode Importance Performance Analysis Tahun 2015. Tugas Akhir. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh November. Surabaya volume IV Nomor